

REVISI

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2015**



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015**

KATA PENGANTAR

PERPRES Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pematapan ketahanan pangan.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut dan sejalan dengan Permentan 135/2013, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Tahun 2015 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan kegiatan Badan Ketahanan Pangan. Sasaran dan indikator kinerja utama harus sesuai dengan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019, sedangkan targetnya ditetapkan berdasarkan kemampuan dan ketersediaan dana.

RKT BKP Tahun 2015 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka pendek (tahunan), dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Ketahanan Pangan.

Jakarta,

Kepala Badan Ketahanan Pangan,

Gardjita Budi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
Bab 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Dasar Hukum	3
Bab 2. TUGAS DAN FUNGSI	4
A. SEKRETARIAT BADAN.....	5
B. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN.....	5
C. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	6
D. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN.....	7
Bab 3. VISI, MISI DAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI	8
A. Visi	8
B. Misi.....	8
C. Tujuan.....	9
D. Sasaran	9
E. Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan	9
F. Strategi Badan Ketahanan Pangan.....	10
Bab 4. PROGRAM DAN KEGIATAN	12
A. Program.....	12
B. Kegiatan	12
Lampiran 1.	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Visi dan Misi Pemerintahan periode 2015-2019 mengamatkan untuk pencapaian Negara yang Bekerja, Kemandirian yang Mensejahterakan dan Revolusi Mental. Negara yang bekerja diwujudkan dengan negara melakukan penciptaan rasa aman dan terlindungi, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, dan pelayanan publik. Kemandirian yang mensejahterakan diciptakan melalui daulat pangan dengan berbasis pada agribisnis kerakyatan, daulat energi yang berbasis pada kepentingan nasional, dan restorasi ekonomi maritim Indonesia. Revolusi mental dilakukan untuk mendukung emansipasi, kemandirian dan kebhinekaan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan sasaran strategis pembangunan pertanian tahun 2015-2019 adalah (1) swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi, (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Sejalan dengan enam sasaran Kementerian Pertanian tersebut, maka Badan Ketahanan Pangan melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program tersebut mencakup 4 (empat) kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan; dan (4) Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan. Kegiatan kesatu sampai ketiga merupakan kegiatan prioritas nasional yang ditujukan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan masyarakat yang membutuhkan partisipasi dan peran serta instansi terkait sesuai dengan masing-

masing program yang dilaksanakan, serta melalui kerjasama dengan *stakeholders*/pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan tahun 2015 merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya dengan program-program aksinya sebagai berikut :

1. Program aksi pada Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan yaitu : (1) Pengembangan Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan dengan model Kawasan Mandiri Pangan, dan (2) Penanganan Rawan Pangan dengan melaksanakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).
2. Program aksi pada Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga pangan, yaitu : (1) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); dan (2) Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat.
3. Program aksi pada Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan, diarahkan pada Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang meliputi: (1) Pengembangan Rumah Pangan Lestari pada P2KP (optimalisasi Pekarangan, Promosi P2KP, Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dan (2) Koordinasi Penanganan Keamanan Pangan Segar.

Selain itu, juga dilakukan peningkatan peran Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang diarahkan dengan : (1) mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah; (2) meningkatkan peran kelembagaan formal dan informal dalam pelaksanaan ketahanan pangan; (3) meningkatkan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan/monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan ketahanan pangan; serta (4) memotivasi masyarakat melalui pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN).

Pada tahun 2015 Badan Ketahanan Pangan, juga melaksanakan pengembangan model pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat pada tahun kelima, dengan program aksinya adalah "Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil/*SOLID* dalam rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga". Program aksi tersebut didanai oleh IFAD dan dilaksanakan di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.

Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja kegiatan ketahanan pangan dalam pencapaian sasaran tahun 2015, perlu mempertimbangkan : (1) keberlanjutan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan dinamika organisasi dan tugas fungsi kelembagaan ketahanan pangan yang baru; (2) fokus dan penajaman pada implementasi tugas dan fungsi kelembagaan dalam mendorong peningkatan pencapaian target diversifikasi pangan dan kesejahteraan petani/masyarakat pedesaan; (3) sinergi antar program/kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya; dan (4) sinkronisasi antara program pusat dan daerah.

B. Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Ketahanan Pangan yang telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pertanian Tahun 2015. Rencana Kinerja Tahunan ini bertujuan untuk menyediakan dokumen yang akan digunakan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran ketahanan pangan Tahun 2015, antara lain: penyusunan IKU Tahun 2015 dan penyusunan Perjanjian Kinerja oleh Eselon I dan Eselon II lingkup Badan Ketahanan Pangan.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 adalah:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.010/8/2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
3. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015-2019;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
5. Rencana Kerja (RENJA) Kementerian Pertanian 2015.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Badan. Badan Ketahanan Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi, pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, pemantapan distribusi pangan dan akses pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Ketahanan Pangan terdiri atas:

1. SEKRETARIAT BADAN;
2. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN;
3. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN;
4. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN.

A. SEKRETARIAT BADAN

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang ketahanan pangan;
2. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
3. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik;
4. Evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Ketahanan Pangan.

B. PUSAT KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan dan penurunan kerawanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
2. Pengkajian di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;

3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan serta penurunan kerawanan pangan.

C. PUSAT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
2. Pengkajian di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;

6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan.

D. PUSAT PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
2. Pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
5. Pelaksanaan pemantapan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar; dan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan, dan keamanan pangan segar.

BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu:

“Terwujudnya **ketahanan pangan** melalui **penganekaragaman pangan** berbasis **sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan**”

Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian mendukung dan menjabarkan visi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 terutama pada aspek ketahanan pangan. Badan Ketahanan Pangan harus berperan sebagai “*lead institutor*” dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

B. Misi

Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2015-2019, yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

C. Tujuan

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

- 1 Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- 2 Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
- 3 Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
- 4 Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
- 5 Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
- 6 Meningkatkan keamanan pangan segar.

D. Sasaran

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan;
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen;
4. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman;
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Tercapainya keamanan pangan segar.

E. Arah Kebijakan Badan Ketahanan Pangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamankan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan (b) memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan.

Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi harga dan pasokan pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan keamanan pangan segar.

Dalam implementasi kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan antara lain: (a) peningkatan koordinasi, dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan, (b) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan, (c) peningkatan kerjasama internasional, (d) peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, (e) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, dan (f) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

F. Strategi Badan Ketahanan Pangan

Arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan tersebut dilakukan dengan 5 (lima) strategi utama, meliputi:

1. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk: (a) meningkatkan produksi pangan domestik; (b) menyediakan lapangan kerja; dan (c) meningkatkan pendapatan masyarakat;

2. Pemenuhan pangan bagi kelompok masyarakat terutama masyarakat miskin kronis dan transien (akibat bencana alam, sosial dan ekonomi) melalui pendistribusian bantuan pangan;
3. Pemberdayaan masyarakat supaya mampu memanfaatkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
4. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal;
5. Penanganan keamanan pangan segar.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan, maka disusun langkah operasional sebagai berikut:

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, melalui:
 - a. Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - b. Analisis ketahanan dan kerentanan pangan wilayah;
 - c. Kajian ketersediaan, akses dan kerawanan pangan;
 - d. Model kawasan mandiri Pangan;
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan, melalui:
 - a. Kajian keterjangkauan pangan;
 - b. Data/informasi pasokan dan harga pangan;
 - c. Model lembaga distribusi pangan masyarakat;
 - d. Model lumbung pangan masyarakat;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan:
 - a. Analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - b. Promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - c. Penanganan keamanan pangan segar;
 - d. Model optimalisasi pekarangan pangan;
 - e. Model pangan pokok lokal.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program

Memperhatikan butir-butir kebijakan ketahanan pangan dan mempertimbangkan penanganan ketahanan pangan lintas pelaku dan wilayah, maka dirumuskan "**Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**". Program tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan penyiapan program, partisipasi pemangku kepentingan dan masyarakat, identifikasi dan intervensi pangan dan gizi, serta pengembangan model kebijakan guna pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan.

Sasaran program (outcome) yang hendak dicapai dalam program tersebut adalah meningkatnya ketahanan pangan melalui ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar di tingkat masyarakat, serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan. Adapun indikator sasaran program (outcome) tahun 2015 yaitu:

1. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan 1 (satu) persen per tahun;
2. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) lebih besar atau sama dengan Harga Pembelian Pemerintah;
3. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (cv) dengan cv kurang dari 5%;
4. Konsumsi Energi sebesar 2.004 kkal/kap/hr;
5. Konsumsi protein sebesar 56,1 gram/kap/hr;
6. Skor PPH Konsumsi sebesar 84,1;

B. Kegiatan

Untuk menyelenggarakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka akan dilaksanakan 4 (empat) kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang meliputi:

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;
4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Kegiatan tersebut dibagi dalam beberapa sub kegiatan yang akan menghasilkan beberapa output sebagai sarana untuk mencapai sasaran program (*outcome*). Kegiatan beserta sub kegiatannya diuraikan berikut ini :

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus pengurangan jumlah penduduk rawan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun.

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, yaitu:

- a. Pengembangan Desa/Kawasan Mandiri Pangan,** adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa rawan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan pengembangan Desa Mandiri Pangan dilakukan melalui pola pengembangan Kawasan Mandiri Pangan perbatasan, Kawasan Mandiri Pangan kepulauan, Kawasan Mandiri Pangan di Papua dan Papua Barat, serta Desa Mandiri Pangan reguler.
- b. Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG),** adalah kegiatan untuk membangun komitmen dan memfasilitasi pemerintah daerah di daerah rawan pangan, agar secara cepat dan tepat dapat mengantisipasi apabila terjadi bencana rawan pangan kronis dan transien. Kegiatan dipadukan dengan penerapan instrumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui tahap pengumpulan data, analisis, pemetaan, peramalan yang dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta intervensi melalui penyediaan dana bansos yang disediakan dengan APBD.

- c. **Analisis ketahanan dan kerentanan pangan wilayah (FSVA).** Tujuan dari penyusunan FSVA adalah untuk menyediakan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan sasaran/lokasi, penanganan kerawanan pangan dan gizi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan dan desa.
- d. **Kajian ketersediaan, akses dan kerawanan** pangan, adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil kajian, secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan dan program ketersediaan, akses dan kerawanan pangan.
- e. **Pemantauan, evaluasi dan perumusan kebijakan ketersediaan dan kerawanan pangan,** kegiatan untuk melaporkan perkembangan ketersediaan dan kerawanan pangan, memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan, dan evaluasi untuk perbaikan kegiatan pada waktu yang akan datang;

Indikator sasaran output kegiatan pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan pada tahun 2015 adalah (a) pengembangan desa/kawasan mandiri pangan sebanyak 429 Desa dan 192 Kawasan; (b) penanganan daerah rawan pangan (SKPG) di 456 kabupaten/kota; (c) tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) sebanyak 34 laporan di provinsi dan 1 pusat; (d) tersusunnya laporan kajian kerawanan pangan sebanyak 34 laporan di provinsi dan 1 pusat; (e) tersusunnya laporan kajian ketersediaan pangan dan akses pangan di 34 provinsi dan 2 pusat.

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat, dan antisipasi kebutuhan pangan.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan.

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu:

- 1. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/LDPM,** adalah kegiatan pemberdayaan Gapoktan dalam rangka meningkatkan kemampuan unit usaha yang dikelolanya melalui pengembangan unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan serta pembangunan sarana penyimpanan sehingga dapat meningkatkan posisi tawar petani, meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan. Pemberdayaan Gapoktan dilakukan di daerah sentra produksi padi dan jagung selama 3 tahun untuk mewujudkan stabilisasi harga pangan di tingkat petani dan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani;
- 2. Pengembangan Kelembagaan Cadangan Pangan,** adalah kegiatan pengembangan cadangan pangan baik di daerah sentra pangan maupun di daerah rawan untuk antisipasi masa panen/masa paceklik, bencana ataupun kerusakan sosial. Cadangan pangan terdiri dari cadangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat. Selain itu, untuk mempercepat fungsi cadangan pangan masyarakat, diusulkan adanya pengisian bahan pangan untuk lumbung dari APBN, serta dipadukan dengan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian untuk pembangunan fisik lumbung;
- 3. Data/informasi pasokan dan harga pangan,** adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, melalui pemantauan secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan harga pangan;
- 4. Kajian keterjangkauan pangan,** kegiatan penyediaan data dan informasi melalui pengumpulan data, pengolahan dan kajian data

distribusi secara cepat yang dilaksanakan dengan akurasi data yang signifikan.

- 5. Pemantauan, evaluasi dan perumusan kebijakan distribusi, harga dan cadangan pangan,** kegiatan untuk melaporkan perkembangan distribusi, harga dan cadangan pangan, memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan, dan evaluasi untuk perbaikan kegiatan pada waktu yang akan datang.

Indikator sasaran kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan tahun 2015 adalah : (a) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat sebanyak 358 gapoktan; (b) Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat sebanyak 1.724 unit; (c) Data/informasi pasokan dan harga pangan sebanyak 35 laporan; (d) Model pemantauan distribusi sebanyak 18 laporan; (e) Informasi kondisi distribusi, harga dan cadangan pangan sebanyak 13 laporan.

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.

Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:

- 1. Pekarangan Pangan,** yaitu kegiatan untuk mendorong gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan: (1) pengembangan K-RPL untuk penguatan konsumsi di tingkat rumah tangga; (2) optimalisasi pemanfaatan pekarangan dalam penyuluhan pangan dan gizi; (3) pemberdayaan kelompok wanita sebagai usaha mikro kecil bidang pangan dalam pengembangan pangan lokal berbasis tepung-tepungan;
- 2. Promosi penganekaragaman konsumsi pangan,** adalah upaya untuk membangun kesadaran seluruh komponen masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan tentang pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan penurunan konsumsi beras per

kapita di tingkat rumah tangga, dengan diimbangi konsumsi pangan hewani, sayuran dan buah yang dilaksanakan antara lain melalui media elektronik, media cetak, media luar ruang dan pameran, kerjasama dengan lintas sektor dan swasta;

- 3. Analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan**, adalah menganalisis dan melaporkan pola konsumsi pangan penduduk yang terjadi di masyarakat secara periodik berdasarkan data sekunder dan survey kecil yang dilakukan secara mandiri;
- 4. Penanganan keamanan pangan segar**, adalah kegiatan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta hasil analisis, secara berkala dan berkelanjutan untuk perumusan kebijakan keamanan pangan segar;
- 5. Model pangan pokok lokal**, adalah upaya mengembangkan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) melalui pengembangan industri pangan olahan dalam rangka mendukung bantuan pangan bagi rumah tangga miskin (Pangkin) di beberapa lokasi sentra produksi pangan lokal, sekaligus pola makan masyarakatnya menggunakan bahan pangan lokal;
- 6. Pemantauan, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP**, yaitu kegiatan untuk melaporkan perkembangan P2KP, memecahkan permasalahan yang dihadapi di lapangan, dan evaluasi untuk perbaikan kegiatan pada waktu yang akan datang.

Indikator sasaran kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan tahun 2015 adalah : (a) Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) sebanyak 4.410 desa; (b) Jumlah hasil promosi P2KP sebanyak 35 laporan; (c) Jumlah hasil analisis situasi konsumsi pangan penduduk sebanyak 35 laporan; (d) Jumlah hasil koordinasi keamanan pangan segar sebanyak 65 laporan; (e) Model pengembangan pangan pokok lokal (MP3L) sebanyak 31 laporan; dan (f) Hasil percontohan fortifikasi beras sebanyak 1 laporan.

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan melayani administrasi, keuangan dan asset terhadap penyelenggaraan operasional kantor.

Sasaran output kegiatan adalah (1) Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Badan Ketahanan Pangan; (2) Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan; serta (3) Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga/*Smallholder Livelihood Development (SOLID)*.

Untuk mencapai sasaran output pertama, ada 4 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

- 1. Perencanaan, penganggaran, dan kerja sama ketahanan pangan,** yaitu aktivitas yang dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional serta kerja sama di bidang ketahanan pangan;
- 2. Pemantauan dan evaluasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan,** adalah kegiatan pemantauan program dan kegiatan ketahanan pangan secara periodik dilaporkan, serta evaluasi setiap semester untuk perbaikan kegiatan kedepan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berjenjang dari tingkat daerah;
- 3. Penanganan organisasi kepegawaian, humas, tata usaha dan hukum,** adalah aktivitas pelayanan organisasi kepegawaian, humas, tata usaha dan hukum terhadap operasional kantor Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian;
- 4. Pelayanan Keuangan dan Perlengkapan,** adalah aktivitas pelayanan keuangan dan perlengkapan untuk menjalankan operasional sekretariat kantor Badan Ketahanan Pangan yang berkaitan dengan kebutuhan gaji, sarana dan prasarana kantor.

Untuk mencapai sasaran output kedua, hanya ada satu sub kegiatan, yaitu **Koordinasi Perumusan Kebijakan, Evaluasi dan Pengendalian Ketahanan Pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.**

Untuk mencapai sasaran output ketiga, ada 5 sub kegiatan yang dilaksanakan dalam **Peningkatan model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga/ *Smallholder Livelihood Development (SOLID)***, yang bekerjasama dengan *International Food for Agricultural Development (IFAD)* di 11 kabupaten di provinsi Maluku dan Maluku Utara, yaitu:

- 1. Pemberdayaan Petani Kecil**, adalah upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan kelompok masyarakat petani dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui pemberdayaan masyarakat secara terprogram, terpadu dan terkoordinasi dalam pelaksanaannya;
- 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**, adalah upaya untuk menggabungkan beberapa kelompok dalam suatu desa sehingga mempunyai kekuatan ekonomi dan sosial sebagai modal dalam melakukan kemitraan dengan kelembagaan yang setaraf kemampuannya;
- 3. Dukunga Manajemen dan Administrasi**, adalah aktivitas untuk melayani manajemen dan administrasi terhadap penyelenggaraan SOLID di pusat, propinsi dan kabupaten;

Indikator Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan pada tahun 2015 untuk **Sasaran output pertama** adalah: (a) Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran ketahanan pangan sebanyak 39 dokumen, (b) Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan sebanyak 39 laporan, (c) Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum sebanyak 152 dokumen, (d) Jumlah dokumen keuangan dan perlengkapan sebanyak 35 dokumen, serta (e) Layanan operasional perkantoran selama 1 tahun; **Sasaran Output kedua** yaitu: Jumlah hasil sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan sebanyak 1 (satu) laporan; serta **Sasaran output ketiga** yaitu: (a) Jumlah hasil usaha tani terpadu sebanyak 11 laporan, (b) Jumlah pemberdayaan petani kecil sebanyak

33.600 KK; (c) Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan sebanyak 224 desa, (d) Jumlah pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur sebanyak 2.240 unit, (e) Jumlah dokumen manajemen SOLID sebanyak 1 dokumen di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan terhadap target yang ditetapkan, dipengaruhi pula oleh peranserta unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian lainnya yang meliputi: Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan POM, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (BULOG), serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan.

Lampiran 1.**Rencana Kinerja Tahunan
Badan Ketahanan Pangan**

Unit Eselon I : Badan Ketahanan Pangan
Tahun : 2015

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya pemantapan ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	1. Skor PPH Ketersediaan	87,52
		2. Penurunan jumlah penduduk rawan pangan	1%
		3. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg)	≥ HPP
		4. Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen (Cv)	< 5%
		5. Konsumsi Energi	2.004 Kkal/Kap/hr
		6. Konsumsi protein	56,1 gram/kap/hr
		7. Skor PPH Konsumsi	84,1
		8. Jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersertifikasi	81 org/thn